
REVITALISASI PROFESI KEPENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Riska Nur Syafrina

riskanursyafrina465@gmail.com

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Siska Shalshabilla

siskashalshabilla09@gmail.com

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Safura

safurafura06@gmail.com

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Safa'atul Habib

syfhabib@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak Profesi kependidikan memegang peran strategis dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, keragaman peserta didik, dan tuntutan sistem pembelajaran inklusif. Urgensi revitalisasi profesi kependidikan terletak pada kebutuhan mendesak akan peningkatan kompetensi, penguatan nilai kemanusiaan, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi revitalisasi profesi kependidikan dengan fokus pada hubungan antara kualitas pendidik, tantangan aktual dalam praktik kependidikan, serta prinsip pendidikan inklusif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah terhadap sumber-sumber literatur relevan. Data dianalisis secara kritis dan sistematis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas guru antar wilayah, kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan zaman, beban administratif yang tinggi, serta rendahnya penghargaan terhadap tenaga kependidikan non-guru. Strategi revitalisasi yang efektif meliputi reformasi sistem rekrutmen, penguatan pelatihan berbasis nilai karakter, optimalisasi teknologi pendidikan, penguatan kolaborasi multipihak, serta kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian profesi kependidikan serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan untuk merancang sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan guna menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik secara adil dan merata.

Kata Kunci : *Revitalisasi profesi kependidikan, pendidikan inklusif, keadilan pendidikan, kompetensi guru, tantangan pendidikan.*

PENDAHULUAN

Profesi pendidikan memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk masa depan karena mereka merupakan tulang punggung dalam mentransfer pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan kepada generasi mendatang. Guru dan pendidik tidak hanya bertanggung jawab atas menyampaikan kurikulum dan materi pelajaran, tetapi juga

memiliki peran yang lebih mendalam dalam membentuk karakter, sikap, dan pandangan dunia siswa. Peran profesi pendidikan tidak dapat diremehkan. Mereka adalah agen perubahan yang kuat dalam membentuk masa depan, baik melalui pembentukan individu yang kompeten dan berdaya saing maupun melalui kontribusi mereka terhadap perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.¹

Keberadaan guru bagi suatu Negara sangatlah penting khususnya bagi Negara berkembang, terutama bagi kelangsungan hidup Negara di tengah era dengan teknologi yang semakin canggih dan segala perubahan, perubahan nilai, seni dalam tataran yang dinamis untuk beradaptasi. Era digital saat ini sangat membutuhkan figure guru yang cocok dalam menghadapi tantangan teknologi dalam pendidikan yang semakin pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan budaya sekolah untuk memenuhi tuntutan abad 21. Mulai dari sistem pendidikan, peragaan kurikulum yang sesuai dan tanggung jawab guru dalam mengidentifikasi, menerapkan, mencapai, dan mempertahankan hasil pembelajaran yang sesuai dengan abad 21.

Pada era saat ini peserta didik sebelum sekolah sudah banyak mengetahui pembelajaran melalui internet. Oleh sebab itu, guru diharapkan mampu menghadapi kondisi peserta didik yang lebih banyak tahu konten pembelajaran yang didapat dari internet. Dalam hal ini guru harus memposisikan diri sebagai mitra belajar peserta didik, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Karena sumber belajar saat ini tidak hanya berasal dari guru tapi sudah banyak tersebar dan mudah diakses oleh teknologi digital.²

Dilihat dari bidang tugas mengajar sehari-hari, masih ada guru yang mengajar dengan kemampuan yang belum memadai, kurang membuat persiapan pembelajaran yang baik, kurang menguasai bahan ajar, memilih dan menggunakan metode dan model pembelajaran yang kurang variatif, kurang mampu merangsang dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, masih mendominasi kegiatan pembelajaran, kurang menguasai ICT, ada yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai tetapi kinerjanya terkategori rendah dan lain sebagainya.³

Sebagai pendidik yang berprofesi sebagai guru, kesadaran akan penerapan etika profesi haruslah menjadi hal yang harus diutamakan. Karena etika merupakan aspek yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang setia berhak memutuskan perilaku yang baik dengan adanya etika ini sesuai dengan norma yang

¹ Inanna, *Peran Profesi Kependidikan Dalam Membangun Nilai-Nilai Karakter* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024), 11.

² Andi Sadriani, Ibrahim Arifin, dan M. Ridwan Said Ahmad, "Peran Guru Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Era Digital," dalam *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Ke-62* (Universitas Negeri Makasar, t.t.), 32–37.

³ Eliterius Sennen, "Problematika Kompetensi dan Profesionalisme Guru," dalam *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Dosen Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia Wilayah IV*, 2017, 16–21.

berlaku. Sehingga akan ada hal-hal positif yang berhubungan dengan kerukunan manusia, seperti antara guru dan siswa.⁴

Artikel ini bertujuan untuk mengulas urgensi revitalisasi profesi kependidikan sebagai langkah strategis mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Revitalisasi tidak hanya mencakup peningkatan kompetensi teknis pendidik, tetapi juga penguatan nilai-nilai inklusivitas, kesadaran multicultural serta komitmen terhadap pemerataan akses.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Studi ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan profesi kependidikan, pendidikan inklusif, dan keadilan dalam pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena artikel ini bersifat konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi revitalisasi profesi kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Data diperoleh melalui studi terhadap literatur yang sudah tersedia (data sekunder), kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menemukan benang merah antara kompetensi pendidik, tantangan aktual, serta kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan tahapan analisis data dalam metode kualitatif menurut Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Esensi Profesi Kependidikan

Esensi profesi kependidikan terletak pada peran penting tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar serta pembentukan karakter pada peserta didik. Hal ini menuntut gurur untuk memiliki esensi profesi kependidikan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Moral dan Sosial

Tanggung Jawab Moral Dan Sosial Profesi kependidikan mengandung tanggung jawab moral dan social yang besar. Guru harus menjadi teladan bagi peserta didik tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga perilaku dan sifat moral.⁵ Tanggung jawab sosial guru mencakup kemampuan membuat keputusan bijak, membangun hubungan positif dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif. Penerapan etika profesi dalam kependidikan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memastikan guru menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan keadilan, sehingga membangun kepercayaan serta kredibilitas di antara siswa, orang tua, dan kolega. Selain itu, pendidikan etika yang diterapkan sejak dini berperan penting dalam membentuk

⁴ Gibran Andika Pratama dan Henry Aditia Rigianti, "Peran Etika dan Profesi Kependidikan dalam Membangun Karakter Peserta Didik dan Mahasiswa Calon Guru SD," *Jurnal Lensa Pendas* Vol.8, No.2 (2023): 179–88.

⁵ Mulyasa, *Menjadi guru profesional: Menciptakan Pembelajaran Yang Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

karakter individu yang mampu menghadapi tantangan global, dengan menanamkan penalaran moral, integritas, empati, dan keterampilan komunikasi. Dengan demikian, integritas dan tanggung jawab sosial yang dimiliki pendidik tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beretika dan berkarakter.

2. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan salah satu inti dari profesi kependidikan yang menunjukkan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam serta mampu mengelolanya dalam proses pembelajaran yang efektif. Penguasaan ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga keterampilan dalam menerapkan ilmu secara kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik. Seorang guru yang profesional harus mampu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran berbasis kompetensi dan perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional berperan penting dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan.⁶ Dengan kompetensi ini, guru tidak sekadar sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, dan pembina karakter yang berperan strategis dalam membentuk generasi unggul.⁷

3. Perkembangan Profesional Berkelanjutan

Perkembangan profesional berkelanjutan merupakan bagian esensial dalam profesi kependidikan yang menekankan pentingnya guru dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta keterampilan sepanjang kariernya. Proses ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, penelitian tindakan kelas, komunitas belajar, hingga studi lanjut. Perkembangan profesional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pendidikan, kemajuan teknologi, dan tuntutan kurikulum yang terus berubah. Dengan mengikuti pengembangan profesional secara terus-menerus, guru mampu memberikan pembelajaran yang relevan dan bermakna serta menjaga mutu pendidikan secara konsisten.⁸

Tantangan dan Masalah Aktual dalam Profesi Kependidikan

1. kualitas guru antar wilayah

Ketimpangan kualitas guru antar wilayah di Indonesia merupakan tantangan serius dalam upaya pemerataan pendidikan nasional. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, terutama antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah distribusi guru yang tidak merata. Banyak guru lebih memilih mengajar di daerah perkotaan yang menawarkan fasilitas dan aksesibilitas yang lebih baik, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga

⁶ Mulyasa, hal. 54.

⁷ Suyanto dan Djihad, *Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Abad 21* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 63.

⁸ Suyanto dan Djihad, hal 48.

pendidik. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan infrastruktur yang terbatas semakin memperparah situasi ini.⁹ Di beberapa daerah, guru harus menempuh perjalanan yang sulit untuk mencapai sekolah, bahkan menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai atau laut.¹⁰

Selain itu, kualifikasi dan kompetensi guru di daerah terpencil sering kali belum memenuhi standar. Banyak guru yang mengajar di wilayah tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, atau bahkan belum menyelesaikan pendidikan jenjang S1/D4.¹¹ Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional juga menghambat peningkatan kompetensi mereka.

Kesejahteraan guru di daerah terpencil juga menjadi faktor yang memengaruhi ketimpangan kualitas pendidikan. Kurangnya insentif finansial dan fasilitas pendukung membuat banyak guru enggan untuk ditempatkan di daerah yang kurang berkembang. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program redistribusi guru dan memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang mengajar di daerah 3T, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan guru untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Dampak dari ketimpangan kualitas guru ini sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Siswa di daerah terpencil sering kali menerima pendidikan dari guru yang kurang kompeten, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar dan prestasi akademik mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan menghambat penerapan metode pembelajaran modern dan inovatif, yang semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan insentif finansial dan menyediakan fasilitas pendukung bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Pengembangan platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh guru dan siswa di daerah terpencil juga harus menjadi prioritas, dengan memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi non-pemerintah dapat membantu dalam penyediaan pelatihan dan sumber daya bagi guru di daerah terpencil.

Ketimpangan kualitas guru antar wilayah di Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan upaya bersama, diharapkan kesenjangan kualitas pendidikan antar

⁹ Suaramuda.net, "Guru dan Fenomena Distribusi Guru dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia," *suaramuda.net*, 2024 <<https://suaramuda.net/2024/12/guru-dan-fenomena-distribusi-guru-dalam-pemerataan-pendidikan-di-indonesia/?>>.

¹⁰ Tempo.co, "Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal," *tempo.co*, 2023 <<https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928?>>.

¹¹ Banten.antaranews.com, "Daerah Terpencil Di Banten Masih Kekurangan Guru," *banten.antaranews.com*, 2012 <<https://banten.antaranews.com/berita/18205/daerah-terpencil-di-banten-masih-kekurangan-guru?>>.

wilayah dapat dikurangi, menuju pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

2. Kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan zaman (digitalisasi, pembelajaran inklusif, dll)

Kurangnya pelatihan guru yang berbasis kebutuhan zaman, khususnya dalam aspek digitalisasi dan pembelajaran inklusif, merupakan tantangan signifikan dalam profesi kependidikan di Indonesia. Meskipun transformasi teknologi dan kebijakan pendidikan inklusif telah menjadi prioritas nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

Dalam konteks digitalisasi, banyak guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan formal yang sistematis dan berkelanjutan.¹² Sebagian besar pelatihan yang ada bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan kurikulum serta karakteristik siswa. Akibatnya, guru kesulitan dalam mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, di mana akses terhadap perangkat teknologi dan konektivitas internet masih menjadi hambatan utama.

Sementara itu, dalam penerapan pembelajaran inklusif, guru dihadapkan pada tantangan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan individu siswa yang beragam.¹³ Kurangnya pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus menyebabkan guru kurang siap dalam mengelola kelas yang heterogen.¹⁴ Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti alat bantu belajar dan dukungan spesialis, turut menghambat efektivitas pembelajaran inklusif. Stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan guru yang berorientasi pada kebutuhan zaman. Program pelatihan harus dirancang secara sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi dan materi pembelajaran yang inklusif. Peningkatan kesadaran

¹² kumparan.com, "3 Tantangan Pendidikan Inklusif yang Dihadapi Guru," *kumparan.com*, 2024 <<https://kumparan.com/ragam-info/3-tantangan-pendidikan-inklusif-yang-dihadapi-guru-23fyizfuta8/2?>>>.

¹³ budgetnesia.com, "Tantangan yang Dihadapi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Inklusif dan Bagaimana Mengatasinya," *budgetnesia.com*, 2023 <<https://www.budgetnesia.com/tantangan-yang-dihadapi-guru-dalam-menerapkan-pembelajaran-inklusif-dan-bagaimana-mengatasinya/?>>>.

¹⁴ Ampun Bantali et al., "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL DI JAWA TENGAH," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 5 (2025), 690–710.

masyarakat melalui kampanye edukasi juga penting untuk mengurangi stigma dan mendukung implementasi pendidikan inklusif yang efektif.¹⁵

Dengan demikian, investasi dalam pelatihan guru yang berbasis kebutuhan zaman menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan guru dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan era digital dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa.¹⁶

3. Beban administratif yang mengganggu fokus pedagogik

Beban administratif yang berlebihan telah menjadi tantangan signifikan dalam profesi kependidikan di Indonesia, mengganggu fokus pedagogik guru dan berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran. Tugas-tugas administratif yang meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengisian data pada berbagai platform digital, pelaporan kegiatan sekolah, hingga pengelolaan nilai siswa, sering kali menyita waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.¹⁷ Penelitian di SMAN 2 Rengat menunjukkan bahwa semakin tinggi beban administrasi yang dirasakan, semakin rendah intensi mengajar guru, yang mengimplikasikan perlunya evaluasi dan penyederhanaan tugas administratif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengajaran.¹⁸

Presiden Joko Widodo juga menyoroti bahwa beban administratif sering kali membuat guru tidak fokus mengajar, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan.¹⁹ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menambahkan bahwa tugas-tugas administrasi yang harus diselesaikan guru dan kepala sekolah menjadi kendala peningkatan mutu pendidikan, karena para pendidik menjadi tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan pelajar.²⁰

Dampak dari beban administratif yang tinggi tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Guru yang terlalu sibuk

¹⁵ Media.cerdig.com, "Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Solusi untuk Sekolah di Indonesia," *media.cerdig.com*, 2024 <<https://media.cerdig.com/pendidikan-inklusif-tantangan-dan-solusi-untuk-sekolah-di-indonesia/?>>>.

¹⁶ Readmore.id, "Pendidikan Inklusif di Era Digital: Manfaat, Tantangan, dan Masa Depan," *readmore.id*, 2025 <<https://readmore.id/pendidikan-inklusif-di-era-digital/?>>>.

¹⁷ Ribka Trifena Putri Gea et al., "ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MENERJAKAN BEBAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA YANG TINGGI DALAM PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PADA PEMBELAJARAN DI SD SWASTA ATTAUFIQ," *Cendekia Pendidikan*, 13.6 (2025), 67–78 <<https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>>.

¹⁸ Suha Rahmadani dan Ahmad Arif Ramli, "PENGARUH BEBAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN TERHADAP INTENSI MENGAJAR GURU DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 RENGAT," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2025), 8–15.

¹⁹ Antaranews.com, "Beban administratif bikin guru tidak fokus mengajar, kata Presiden," *antaranews.com*, 2020 <<https://www.antaranews.com/berita/1400234/beban-administratif-bikin--tidak-fokus-mengajar-kata-presiden?>>>.

²⁰ Medcom.id, "Nadiem: Beban Administrasi Guru Penghambat Peningkatan Mutu Pendidikan," *medcom.id*, 2021 <<https://www.medcom.id/pendidikan/cerita-guru/VNxgVDyK-nadiem-beban-administrasi-guru-penghambat-peningkatan-mutu-pendidikan?>>>.

dengan tugas administratif cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan siswa, merancang pembelajaran yang inovatif, dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap proses belajar mengajar. Hal ini dapat mengurangi kualitas pembelajaran dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, tekanan administratif yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada guru, yang pada akhirnya menurunkan motivasi dan kinerja mereka dalam mengajar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang membebani guru dengan tugas administratif yang tidak relevan dengan proses pembelajaran. Kedua, pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan user-friendly dapat membantu menyederhanakan proses administrasi, sehingga guru dapat lebih fokus pada tugas mengajar. Ketiga, penambahan tenaga administrasi di sekolah dapat membantu membagi beban kerja administratif, memungkinkan guru untuk lebih berkonsentrasi pada pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.²¹

Dengan mengurangi beban administratif yang tidak perlu dan memberikan dukungan yang memadai kepada guru, diharapkan mereka dapat lebih fokus pada peran utama mereka sebagai pendidik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

4. Kesenjangan pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga kependidikan non-guru

Kesenjangan pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga kependidikan non-guru di Indonesia merupakan isu yang signifikan dalam dunia pendidikan. Meskipun peran mereka sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran, tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran, teknisi, dan staf administrasi sering kali kurang mendapatkan pengakuan yang setara dengan guru.

Salah satu penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kurangnya kebijakan yang secara eksplisit mengakui kontribusi tenaga kependidikan non-guru.²² Meskipun terdapat penghargaan bagi guru dan kepala sekolah yang dedikatif, inovatif, dan inspiratif, penghargaan serupa untuk tenaga kependidikan non-guru masih terbatas. Sebagai contoh, Universitas Indonesia telah mengadakan penghargaan bagi tenaga kependidikan berprestasi, namun inisiatif serupa belum merata di seluruh institusi pendidikan .

Selain itu, tenaga kependidikan non-guru sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengembangan karier dan kesejahteraan. Mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk

²¹ Slbsimpangempat.sch.id, "Pada Saat ini Guru Itu Harus Fokus Mengajar, Bukan Banyak Tugas Administrasi," *slbsimpangempat.sch.id*, 2024 <<https://slbsimpangempat.sch.id/pada-saat-ini-guru-itu-harus-fokus-mengajar-bukan-banyak-tugas-administrasi/?>>.

²² Muhamad Roby Ashari, Ahmad Syadzili, dan Baharuddin, "Evaluasi dampak kebijakan penghargaan guru berprestasi terhadap kinerja dan motivasi guru Sekolah Menengah Atas," 6.2 (2025), 132–40 <<https://doi.org/10.32832/itjmie.v6i2.17420>>.

mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesional yang dapat meningkatkan kompetensi dan jenjang karier mereka. Hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja mereka dalam mendukung proses pendidikan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan institusi pendidikan. Pertama, perlu adanya kebijakan yang secara jelas mengakui peran dan kontribusi tenaga kependidikan non-guru dalam sistem pendidikan. Kedua, institusi pendidikan perlu menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang ditujukan khusus bagi tenaga kependidikan non-guru. Ketiga, sistem penghargaan dan insentif perlu diperluas untuk mencakup tenaga kependidikan non-guru yang berprestasi, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka.

Dengan mengakui dan menghargai peran tenaga kependidikan non-guru, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara keseluruhan. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem pendidikan yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.

Urgensi Pendidikan Inklusif dan berkeadilan

1. Urgensi Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan

Dalam konteks pendidikan, peserta didik bukanlah individu yang homogen, melainkan memiliki keberagaman dalam berbagai aspek, mulai dari pengetahuan hingga perbedaan fisik. Ada yang normal dan ada juga anak yang disabilitas. Keberagaman ini bukan penghalang dalam proses belajar, melainkan sumber kekayaan yang dapat memperkaya dinamika pembelajaran jika dikelola dengan tepat.

Menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menganut prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang perbedaan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dilingkungan sekolah yang sama dengan teman-teman sebaya mereka. Dalam pendidikan inklusif, tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan, latar belakang, jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau kondisi fisik dan mental.²³ Pernyataan ini diperkuat oleh aturan pemerintah dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut Gargiulo & Meltcalf yang dikutip dalam buku Durotul Yatimah menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah usaha untuk memberikan

²³ Diajeng Tyas Pinru Phytanza dkk., *Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022), hal.85.

kesempatan kepada semua anak agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan. Pendidikan inklusif juga perlu mempertimbangkan berbagai macam hambatan yang bisa menghalangi anak untuk berpartisipasi yang bermakna didalam kelas.²⁴

Menurut J. David Smith pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugerah yang sama dari setiap peserta didik, artinya setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan persyaratan- persyaratan yang sama serta fasilitas- fasilitas pendidikan yang terpisah bersifat tidak sama atau seimbang.²⁵

Menurut Khairudin pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan.²⁶

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik, termasuk anak- anak berkebutuhan khusus, dalam satu sistem pendidikan yang sama.²⁷ Tujuannya adalah menghilangkan deskriminasi dalam pendidikan dan memberikan peluang yang setara bagi semua anak untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka.²⁸

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk berpartisipasi penuh dalam sistem pendidikan yang sama. Pendidikan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman, kesetaraan hak, dan akses yang adil terhadap fasilitas pendidikan. Hambatan belajar harus diidentifikasi dan diatasi agar setiap peserta didik dapat terlibat secara bermakna dalam proses pembelajaran. Pendidika inklusif menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan penyimpangan, dan mendorong sistem pendidikan yang terbuka serta menghormati hak asasi manusia.²⁹

Dalam konteks ini, prinsip- prinsip pendidikan inklusif menjadi landasan utama yang mengarahkan bagaimana sistem pendidikan seharusnya dirancang dan dijalankan agar mampu memenuhi kebutuhan semua peserta didik tanpa terkecuali. Adapun prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai berikut :

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan inklusif

Prinsip ini menekankan bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata. Pendidikan inklusif bertujuan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam akses pendidikan, serta memastikan bahwa semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, menerima pembelajaran yang

²⁴ Durotul Yatimah dkk., *Pendidikan Inklusif* (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), hal. 5.

²⁵ Iwan Sopwandi dan Isep Nendri Rostiana, *Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Selat Media, 2024.), hal 3.

²⁶ Khairuddin, "Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Tazkiya* Vol. 9 No.1 (2020): hal 82.

²⁷ Farhan Alfikri, Nyanyu Khodijah, dan Ermis Suryana, "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.7 No. 6 (2022): hal. 7955.

²⁸ Fitri Lastini dkk., "Implementasi Strategi Pembelajaran Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 09 No. 03 (2024.): hal 209.

sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pemerataan tidak hanya berarti menyediakan tempat di sekolah, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran, kurikulum, dan fasilitas yang mendukung perkembangan optimal semua peserta didik.

2. Prinsip keberagaman

Keberagaman merupakan fondasi utama dalam pendidikan inklusif. Prinsip ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak dianggap sebagai masalah, melainkan sebagai kekayaan yang memperkaya proses pembelajaran. Dengan menghargai keberagaman, sekolah diharapkan menciptakan budaya inklusif yang menerima, menghormati, dan mendukung semua siswa untuk tumbuh dan belajar bersama dalam suasana yang positif.

3. Prinsip kebermaknaan

Prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik. Artinya, proses pendidikan harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan nyata, konteks sosial, serta potensi masing-masing anak. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk terlibat aktif, memahami materi secara mendalam, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inklusif, kebermaknaan juga berarti bahwa semua anak merasa dihargai, diterima, dan diikutsertakan secara utuh dalam kehidupan sekolah.

4. Prinsip keberlanjutan

Keberlanjutan dalam pendidikan inklusif mengacu pada upaya jangka panjang untuk terus mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini mencakup perencanaan kebijakan, pengembangan profesional guru, serta penguatan sistem pendukung yang terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik. Dengan keberlanjutan, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi program sementara, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

5. Prinsip keterlibatan

Pendidikan inklusif tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan semua pihak, termasuk guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai elemen pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan responsif. Keterlibatan juga mencakup pemberian ruang bagi suara peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, agar mereka merasa memiliki peran dalam proses pendidikan yang dijalani. Melalui keterlibatan yang aktif, pendidikan inklusif dapat tumbuh sebagai sistem yang partisipatif dan demokratis.³⁰

Dari kelima prinsip itu terdapat hubungan yang saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membangun lingkunganbelajr yang responsive terhadap perbedaan. Pendidikan inklusif tidak hanya menuntut akses yang setara, tetapi

³⁰ Maman Suriaman, "Pendidikan Inklusif Dalam Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah," *Literasi Kita Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2023): hal 124.

juga kualitas pendidikan yang relevan dan berkelanjutan serta partisipasi aktif semua pihak. Prinsip-prinsip ini menjadi arah kebijakan dan praktik pendidikan yang menjamin bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi secara optimal didalam masyarakat.

Dalam implementasinya, pendidikan inklusif membawa berbagai dampak, baik secara individual maupun sosial. Salah satu dampak positif utamanya adalah peningkatan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar disekolah umum, yang memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berkembang. Interaksi dengan teman sebaya turut mendorong perkembangan sosial- emosional, seperti keterampilan sosial, empati, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan.

Selain itu, pendidikan inklusif menumbuhkan sikap saling menghormati dikalangan peserta didik berkebutuhan khusus, yang belajar untuk menerima keragaman dalam kemampuan, budaya dan latar belakang. Dalam aspek akademik, peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkembang sesuai dengan potensinya melalui dukungan dan penyesuaian pembelajaran, sementara peserta didik lainnya juga mendapatkan manfaat dari lingkungan yang kaya keragaman.

Pendidikan inklusif juga mendorong kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Lebih jauh, pendidikan ini meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri peserta didik berkebutuhan khusus, serta menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif. Dalam jangka panjang, pendidikan inklusif membuka peluang kerja dan kehidupan mandiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk terus mendorong implementasi pendidikan inklusif demi terciptanya lingkungan belajar yang adil, setara, dan bermanfaat bagi semua.³¹

Strategi Revitalisasi Profesi Kependidikan

Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan tidak akan terwujud tanpa dukungan dari tenaga kependidikan yang kompeten, adaptif dan berkomitmen. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategi yang mampu memperkuat fondasi profesi kependidikan secara holistik. **Pertama**, Reformasi sistem rekrutmen dan pelatihan guru berbasis kompetensi masa kini. Suwandi menjelaskan bahwa problematika pengadaan guru bersumber pada tiga perkara, yaitu ketidaksesuaian kualifikasi guru berdasarkan kualifikasi pelamar, mutasi guru tidak sesuai dengan kualifikasi guru, serta formasi guru tidak sesuai dengan kebutuhan. Perlunya membenahi program rekrutmen tenaga pendidik yang kurang efektif, dengan menerapkan prinsip kesesuaian.³² Prinsip

³¹ Justin Niaga Siman Juntak dkk., "Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua : Studi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia," *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah* Vol. 5 No. 2 (2023.): hal 209-210.

³² S. Adevia Ayu Kusumaning Putri dan Karwanto, "Sistem Rekrutmen Guru dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Vol.9, No.1 (2021): 229-32.

yang dimaksud adalah kesesuaian antara individu dan organisasi, kesesuaian sekolah dengan guru, kesesuaian guru dengan peserta didik dan kualifikasi guru.

Kedua, Penguatan pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan dalam pelatihan guru. Guru dilatih untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti religius, toleransi, tanggung jawab, dan gotong royong ke dalam setiap mata pelajaran, manajemen kelas, serta kegiatan literasi. Dalam praktiknya, guru diajak untuk mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menekankan pada pembelajaran aktif, menyenangkan, dan tidak bersifat indoktrinasi. Selain itu, pelatihan ini juga memperkuat kapasitas guru dalam menciptakan budaya kelas yang menghargai pendapat, saling menolong, serta menumbuhkan empati dan kepedulian sosial antar siswa. Dengan pelatihan ini, guru tidak hanya dibekali dengan kemampuan pedagogis, tetapi juga ditanamkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam membentuk karakter siswa secara utuh dan kontekstual sesuai dengan tantangan zaman.³³

Ketiga, Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan. Teknologi pendidikan seperti e-learning dan blended learning memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses materi pembelajaran, melaksanakan evaluasi, serta mengelola administrasi secara lebih efisien dan fleksibel. Dengan adanya platform digital, guru dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan interaktif, memanfaatkan berbagai media seperti video, simulasi, serta forum diskusi online. Selain itu, teknologi juga mempermudah kolaborasi antarguru, membuka akses pelatihan daring, dan meningkatkan profesionalisme melalui pertukaran praktik terbaik. Agar pemanfaatan ini optimal, institusi pendidikan perlu memberikan pelatihan berkelanjutan, dukungan teknis, serta infrastruktur yang memadai. Pelatihan ini mencakup penguasaan perangkat digital, perencanaan pembelajaran berbasis teknologi, serta perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan yang terstruktur, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu mengajar, tetapi juga sarana strategis untuk memberdayakan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal.³⁴

Keempat, Perluasan ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Perluasan ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, keterlibatan berbagai pihak seperti guru, akademisi, praktisi industri, komunitas lokal, dan pemerintah sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran perspektif yang kaya serta perumusan kebijakan dan materi pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap tantangan global dan lokal. Guru, sebagai pelaku utama di ruang kelas, memiliki peran vital dalam menyuarakan kebutuhan dan kondisi nyata peserta didik, sedangkan akademisi dan praktisi dapat memberikan wawasan teoretis dan praktikal yang memperkaya substansi kurikulum. Komunitas lokal juga berkontribusi dalam menjaga relevansi budaya dan nilai-nilai lokal dalam pendidikan. Untuk mendukung perluasan kolaborasi ini,

³³ Sulistyarini dkk., "Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas Bagi Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* Vol.5, No.3 (2024): 3573–81.

³⁴ Marsha Aulia Ferdinan Putri, Septi Ayu Larasati, dan Siti Rohayati, "Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Era Digital," *Journal on Education* Vol.07, No.02 (2025): 12192–1200.

dibutuhkan model kerja sama yang sistematis seperti pembentukan tim pengembang kurikulum inklusif, pelaksanaan workshop dan seminar bersama, serta penerapan sistem umpan balik berkelanjutan. Semua ini harus didukung oleh komitmen bersama dan infrastruktur yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan, baik melalui pertemuan fisik maupun digital. Dengan demikian, ruang kolaborasi yang luas dan inklusif akan memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan pencetak generasi unggul di era modern.³⁵

Kelima, Kebijakan afirmatif bagi guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

KESIMPULAN

Revitalisasi profesi kependidikan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam membentuk karakter serta kompetensi peserta didik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan kualitas guru antar wilayah, minimnya pelatihan berbasis kebutuhan zaman, beban administratif yang berlebihan, dan kurangnya penghargaan terhadap tenaga kependidikan non-guru.

Untuk itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan melalui reformasi rekrutmen guru, penguatan pelatihan berbasis nilai kemanusiaan, pemanfaatan teknologi, perluasan kolaborasi lintas sektor, serta kebijakan afirmatif khususnya untuk daerah 3T. Pendidikan inklusif tidak akan berhasil tanpa tenaga pendidik yang kompeten, adaptif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap keberagaman peserta didik.

Dengan kolaborasi semua pihak, komitmen kebijakan yang kuat, serta penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan, pendidikan inklusif bukan hanya menjadi slogan—tetapi akan benar-benar menjadi realita yang mampu memberikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampun Bantali Et Al., “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Di Jawa Tengah,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar*, 5 (2025), 690–710.
- Andi Sadriani, Ibrahim Arifin, Dan M. Ridwan Said Ahmad, “Peran Guru Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Di Era Digital,” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Ke-62* (Universitas Negeri Makasar, T.T.), 32–37.
- Antaraneews.Com, “Beban Administratif Bikin Guru Tidak Fokus Mengajar, Kata Presiden,” *Antaraneews.Com*, 2020
<<https://www.antaraneews.com/berita/1400234/beban-administratif-bikin--tidak-fokus-mengajar-kata-presiden?>>.

³⁵ Ichwan Erlangga Ruhushandy, Ahmadin, dan Syamsu A Kamaruddin, “Kolaborasi Guru dan Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum IPS: Sebuah Analisis,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.1 (2024): 1238–44.

- Banten.Antaranews.Com, “Daerah Terpencil Di Banten Masih Kekurangan Guru,” *Banten.Antaranews.Com*, 2012 <<https://Banten.Antaranews.Com/Berita/18205/Daerah-Terpencil-Di-Banten-Masih-Kekurangan-Guru?>>.
- Budgetnesia.Com, “Tantangan Yang Dihadapi Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Inklusif Dan Bagaimana Mengatasinya,” *Budgetnesia.Com*, 2023 <<https://Www.Budgetnesia.Com/Tantangan-Yang-Dihadapi-Guru-Dalam-Menerapkan-Pembelajaran-Inklusif-Dan-Bagaimana-Mengatasinya/?>>.
- Chwan Erlangga Ruhushandy, Ahmadin, Dan Syamsu A Kamaruddin, “Kolaborasi Guru Dan Stakeholder Dalam Pengembangan Kurikulum Ips: Sebuah Analisis,” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* Vol.4, No.1 (2024): 1238–44.
- Diajeng Tyas Pinru Phytanza Dkk., *Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan* (Batam: Cv. Rey Media Grafika, 2022), Hal.85.
- Durotul Yatimah Dkk., *Pendidikan Inklusif* (Madiun: Cv. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), Hal. 5.
- Eliterius Sennen, “Problematika Kompetensi Dan Profesionalisme Guru,” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Dosen Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia Wilayah Iv*, 2017, 16–21.
- Farhan Alfikri, Nyanyu Khodijah, Dan Ermis Suryana, “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.7 No. 6 (2022): Hal. 7955.
- Fitri Lastini Dkk., “Implementasi Strategi Pembelajaran Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 09 No. 03 (2024.): Hal 209.
- Gibran Andika Pratama Dan Henry Aditia Rigianti, “Peran Etika Dan Profesi Kependidikan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Dan Mahasiswa Calon Guru Sd,” *Jurnal Lensa Pendas* Vol.8, No.2 (2023): 179–88.
- Inanna, *Peran Profesi Kependidikan Dalam Membangun Nilai-Nilai Karakter* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024), 11.
- Iwan Sopwandi Dan Isep Nendri Rostiana, *Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Selat Media, 2024.), Hal 3.
- Justin Niaga Siman Juntak Dkk., “Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia,” *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah* Vol. 5 No. 2 (2023.): Hal 209-210.
- Khairuddin, “Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Tazkiya* Vol. 9 No.1 (2020): Hal 82.
- Kumparan.Com, “3 Tantangan Pendidikan Inklusif Yang Dihadapi Guru,” *Kumparan.Com*, 2024 <<https://Kumparan.Com/Ragam-Info/3-Tantangan-Pendidikan-Inklusif-Yang-Dihadapi-Guru-23fyizfuta8/2?>>.
- Maman Suriaman, “Pendidikan Inklusif Dalam Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah,” *Literasi Kita Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2023): Hal 124.
- Marsha Aulia Ferdinan Putri, Septi Ayu Larasati, Dan Siti Rohayati, “Pemanfaatan Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Era Digital,” *Journal On Education* Vol.07, No.02 (2025): 12192–1200.
- Medcom.Id, “Nadiem: Beban Administrasi Guru Penghambat Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Medcom.Id*, 2021 <<https://Www.Medcom.Id/Pendidikan/Cerita-Guru/Vnxgvdyk-Nadiem-Beban-Administrasi-Guru-Penghambat-Peningkatan-Mutu-Pendidikan?>>.

- Media.Cerdig.Com, “Pendidikan Inklusif: Tantangan Dan Solusi Untuk Sekolah Di Indonesia,” *Media.Cerdig.Com*, 2024 <<https://Media.Cerdig.Com/Pendidikan-Inklusif-Tantangan-Dan-Solusi-Untuk-Sekolah-Di-Indonesia/?>>.
- Muhamad Roby Ashari, Ahmad Syadzili, Dan Baharuddin, “Evaluasi Dampak Kebijakan Penghargaan Guru Berprestasi Terhadap Kinerja Dan Motivasi Guru Sekolah Menengah Atas,” 6.2 (2025), 132–40 <<https://doi.org/10.32832/itjmie.V6i2.17420>>.
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional : Menciptakan Pembelajaran Yang Kreatif Dan Menyenangkan* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Readmore.Id, “Pendidikan Inklusif Di Era Digital: Manfaat, Tantangan, Dan Masa Depan,” *Readmore.Id*, 2025 <<https://Readmore.Id/Pendidikan-Inklusif-Di-Era-Digital/?>>.
- Ribka Trifena Putri Gea Et Al., “Analisis Kesulitan Guru Dalam Mengerjakan Beban Administrasi Kurikulum Merdeka Yang Tinggi Dalam Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pembelajaran Di Sd Swasta Attaufiq,” *Cendekia Pendidikan*, 13.6 (2025), 67–78 <<https://doi.org/10.9644/Sindoro.V3i9.252>>.
- S. Adevia Ayu Kusumaning Putri Dan Karwanto, “Sistem Rekrutmen Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Vol.9, No.1 (2021): 229–32.
- Slbsimpangempat.Sch.Id, “Pada Saat Ini Guru Itu Harus Fokus Mengajar, Bukan Banyak Tugas Administrasi,” *Slbsimpangempat.Sch.Id*, 2024 <<https://Slbsimpangempat.Sch.Id/Pada-Saat-Ini-Guru-Itu-Harus-Fokus-Mengajar-Bukan-Banyak-Tugas-Administrasi/?>>.
- Suaramuda.Net, “Guru Dan Fenomena Distribusi Guru Dalam Pemerataan Pendidikan Di Indonesia,” *Suaramuda.Net*, 2024 <<https://Suaramuda.Net/2024/12/Guru-Dan-Fenomena-Distribusi-Guru-Dalam-Pemerataan-Pendidikan-Di-Indonesia/?>>.
- Suha Rahmadani Dan Ahmad Arif Ramli, “Pengaruh Beban Administrasi Pendidikan Terhadap Intensi Mengajar Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rengat,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2025), 8–15.
- Sulistyarini Dkk., “Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas Bagi Guru Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* Vol.5, No.3 (2024): 3573–81.
- Suyanto Dan Djihad, *Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Abad 21* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hal. 63.
- Tempo.Co, “Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Di Daerah Tertinggal,” *Tempo.Co*, 2023 <<https://www.Tempo.Co/Politik/Ketimpangan-Pendidikan-Di-Daerah-3t-819928?>>.